



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EKO ANINDITO PUTRO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 645323

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.228.358.000**

1. Tanah Seluas 386 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 61.760.000
2. Tanah Seluas 358 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 287.116.000
3. Tanah Seluas 330 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, WARISAN Rp. 420.420.000
4. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, WARISAN Rp. 153.500.000
5. Tanah Seluas 381 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 305.562.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **141.500.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
2. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **122.200.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **378.229.220**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----
Rp. 1.870.287.220

III. HUTANG

Rp. ----
Rp. 1.870.287.220

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.